

RINGKASAN HASIL PENELITIAN
FORMULASI KONSEP ISLAM TENTANG
PEMBANGUNAN EKONOMI PADAT PENDUDUK
(ANALISIS PEMIKIRAN FAHIM KHAN
Oleh: Dr. Ali Murtadho, M.Ag

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa teori tentang strategi pembangunan di negara yang mengalami problem kependudukan kebanyakan dirumuskan oleh para ekonom konvensional yang banyak dibingkai paham kapitalisme. Namun gagasan tersebut tidak terlepas dari berbagai sorotan kritis. Ekonomi neoklasikal yang liberalistik dengan bersendikan fundamentalisme pasar dinilai hanya berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dengan keyakinan bahwa hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan rakyat dapat teratasi.¹ Mahbub ul Haq, menyatakan kritiknya sebagai berikut: "Yes, increased productivity is necessary. But let us ask the question, increased productivity of whom and for whom? Not only should a strategy be designed for the distribution of productive assets and public social services, the productivity of the majority of the poor should be increased."²

Dalam jajaran para pemikir ekonomi Islam, kritik terhadap strategi pembangunan barat disertai tawaran alternatif dari perspektif ekonomi Islam dilontarkan oleh Fahim Khan, ketua Pusat Bisnis Islam Universitas Internasional Riphah Pakistan, aktivis dan pernah menjadi direktur Islamic Research and Training Institute (IRTI). Pemikiran Fahim Khan berangkat dari keprihatinannya terhadap strategi konvensional dalam mengatasi problematika pengangguran terutama di negara-negara yang sedang berkembang yang berupaya memacu pembangunan ekonomi. Fokus perhatian strategi tersebut bertumpu pada masalah banyaknya surplus tenaga kerja serta kondisi upah yang memprihatinkan.

Pandangan Fahim Khan tentu mewakili pandangan para ahli ekonomi Islam pada umumnya yang mempromosikan keunggulan sistem ekonomi Islam yang tidak berbasis

¹ Sri-Edi Swasono, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010, hlm. 49.

² Mahbub ul Haq, *Reflections on Human Development : How The Focus of Development Economics Shifted from National Income Accounting to People Centred Policies, Told by One of The Chief Architects of The New Paradigm*, New York: Oxford Univ. Press, 1995, hlm. 8.

bunga sebagai sistem ekonomi alternatif untuk mengatasi masalah-masalah krusial ekonomi. Gagasannya tentu memicu pertanyaan lebih jauh mengenai implementasinya di tengah perkembangan ekonomi Islam kontemporer yang didominasi oleh kesemarakannya promosi bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Sejauh mana rumusan-rumusan konsep tersebut kompatibel dengan berbagai konsepsi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam bersinergi mewujudkan misi substantif ekonomi Islam mensejahterakan kehidupan umat secara komprehensif.

B. Permasalahan

1. Apa substansi pemikiran Fahim Khan tentang strategi Islami bagi pembangunan ekonomi padat penduduk dan bagaimana kejelasan implementasinya ?
2. Apa yang melatarbelakangi munculnya konsep tersebut dan bagaimana pola pendekatan kajian ekonomi Islam yang dipakai Fahim Khan dalam menformulasikan konsep tersebut?
3. Bagaimana korelasi substansial antara konsep strategi pembangunan ekonomi Islam tersebut dengan konsep operasional lembaga keuangan/perbankan syariah?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang ingin mengungkap kejelasan konsep Fahim Khan mengenai strategi pembangunan ekonomi Islam pada negara yang berkelimpahan penduduk (sumber daya manusia) ini termasuk kategori *library research*. Sumber datanya berupa data kepustakaan yakni berbagai referensi terkait karya-karya Fahim Khan, utamanya yang terangkum dalam bukunya *Essays in Islamic Economics*. Juga literatur-literatur ekonomi Islam dan ekonomika pembangunan, serta literatur-literatur lain yang terkait.

Penelitian dengan pendekatan ekonomi Islam ini dilakukan dengan mengidentifikasi gagasan/pemikiran Fahim Khan dengan dikomunikasikan dengan teori-teori ekonomi Islam serta teori-teori ekonomi pembangunan untuk diketahui latar belakang formulasinya, pendekatan yang dipakai, implementasinya serta korelasinya secara substansial dengan konsep operasional lembaga keuangan/perbankan syariah.

BAB II

KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Kependudukan dan Problematika Ekonominya

Dalam teori ekonomi kependudukan, cepatnya pertambahan jumlah penduduk akan menghambat perkembangan ekonomi. Menurut para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus, akan selalu ada persaingan atau perlombaan antara tingkat output ekonomi yang dihasilkan dengan tingkat kenaikan jumlah penduduk, yang dimenangkan oleh tingkat kenaikan jumlah penduduk. Penduduk di samping sebagai konsumen juga berfungsi sebagai tenaga kerja. Sebagai konsumen penduduk membutuhkan ketersediaan berbagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai tenaga kerja, penduduk memerlukan ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Kenaikan penduduk yang lebih cepat dari tingkat kenaikan ketersediaan output serta tingkat perluasan lapangan pekerjaan akan menimbulkan problematika pembangunan ekonomi.³

Cepatnya pertambahan jumlah penduduk atau disebut dengan ledakan penduduk dapat menjadi salah satu perintang pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang memang pada umumnya mengalami ledakan penduduk. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang biasa diukur dengan kenaikan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita dihitung dari seluruh pendapatan nasional riil atau output yang dihasilkan secara keseluruhan selama satu tahun dibagi seluruh jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk harus lebih bertambah pula output total yang dihasilkan agar penghasilan riil perkapita naik.⁴

Laju pertambahan penduduk yang cepat tidak selalu merupakan penghambat bagi proses pembangunan ekonomi ketika jumlah penduduk itu memiliki kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan (sebagai produsen) dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan (sebagai konsumen). Tingkat pertambahan penduduk yang tinggi harus disertai tingkat penghasilan yang tinggi pula. Pertambahan jumlah penduduk tetapi tingkat penghasilan rendah tidak akan ada manfaat positif bagi pembangunan ekonomi,⁵ dan justru menjadi satu masalah utama dalam pembangunan.

B. Pengangguran dan Teori Pembangunan Ekonomi Terkait

Ketika terjadi kenaikan jumlah penduduk yang cepat yang berarti jumlah pencari kerja bertambah banyak, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia masih tetap tidak mengalami perluasan, maka terjadi pengangguran tenaga kerja. Persoalan paling krusial akibat berlimpahnya jumlah penduduk adalah pengangguran. Dalam literatur ekonomi ketenagakerjaan dinyatakan bahwa terjadinya pengangguran akibat adanya ketidakseimbangan angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang menginginkan pekerjaan (penawaran tenaga kerja) lebih besar dari pada lowongan

³ Irawan & M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE, 1996, hlm. 47.

⁴ Ibid., hlm. 43.

⁵ Ibid., hlm. 45.

tenaga kerja yang tersedia (permintaan tenaga kerja). Orang-orang yang menawarkan tenaganya untuk mencari pekerjaan dan berhasil masuk dalam golongan bekerja sedangkan sisanya yang tidak memperoleh pekerjaan masuk dalam golongan penganggur.⁶

Kajian intensif terhadap masalah pengangguran menghasilkan berbagai teori yang menjelaskan berbagai gejala atau variabel yang berhubungan dengan pengangguran. Misalnya teori yang menjelaskan keterkaitan hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Ketika laju pertumbuhan ekonomi tinggi, produksi barang maupun jasa meningkat dan bersama dengan itu tingkat pengangguran menurun. Ada hubungan negatif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Hubungan ini dikenal sebagai hukum Okun (Okun's law).⁷⁸

Di sisi lain, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin tinggi.⁹ Namun hal ini tidak berlaku sepenuhnya karena ada hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, sehingga setelah suatu tingkat penggunaan tenaga kerja tertentu, jumlah produk total yang dapat dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut akan berkurang. Dengan kata lain setelah tenaga kerja mencapai jumlah tertentu, produk marginal tenaga kerja tambahan menjadi negatif. Pada saat itulah terdapat apa yang disebut dengan pengangguran tenaga kerja. Faktor tenaga kerja tidak cukup dilihat dari segi jumlahnya saja melainkan juga harus melihat segi kualitas tenaga kerja tersebut.¹⁰

Teori tentang pengangguran memang tidak terlepas dari teori-teori terkait karena pengangguran bukanlah persoalan mandiri yang muncul begitu saja. Penjelasan tentang problem pengangguran tidak dapat terlepas dari penjelasan tentang teori pembangunan ekonomi misalnya, karena perluasan kesempatan kerja terkait dengan masalah pembangunan ekonomi dan pengalokasian sumber daya manusia dari penduduk yang banyak. Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dengan pengangguran. Ketika ekonomi tumbuh dan berada dalam perluasan, pengangguran selalu turun, ketika ekonomi berada dalam resesi, pengangguran selalu naik, meskipun sering dengan kelambatan.¹¹

Persoalan surplus tenaga kerja sangat terkait dengan perluasan kesempatan kerja yang berhubungan dengan peningkatan produksi yang tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. Seiring dengan era industrialisasi yang diikuti kemajuan dan keterbelakangan negara-negara di dunia dalam bidang ekonomi, banyak ekonom berupaya memperjelas berbagai fenomena pembangunan ekonomi yang berimbas pada penggunaan ketenagakerjaan.

⁶ Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 134.

⁷ M. Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*, Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE, 1998, hlm. 10.

⁸ Bradley R. Schiller, *The Economy Today*, ninth edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2003, hlm. 115.

⁹ Pada dasarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu dipengaruhi oleh dua factor : ketersediaan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Lihat : Ibid., hlm. 114.

¹⁰ M. Suparmoko, *Op.Cit.*, hlm. 239-240.

¹¹ David C. Colander, *Economics*, Edisi V, New York: McGraw-Hill/Irwin. 2004, hlm. 497-498.

Teori pengangguran atau kajian penanggulangan pengangguran pada dasarnya adalah kajian bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi pada tingkat full employment di mana semua sumber faktor produksi terfungsikan secara optimal di mana penawaran tenaga sama dengan permintaan tenaga kerja sehingga tidak ada pengangguran yang membahayakan selain pembpengangguran friksional. Kondisi menuju ini melibatkan berbagai macam teori pembangunan. Maka kajian menuju terselaisakannya masalah pengangguran berkaitan erat dengan teori-teori pembangunan.

Namun teori-teori yang terkait dengan pengangguran tersebut banyak dimunculkan sejak era industrialisasi di Barat, dan memunculkan teori-teori yang ternyata masih mengandung kelemahan terbukti dengan masih tetap kurang efektifnya teori itu. Teori-teori seluruhnya dibangun oleh ekonom barat sejak Adam Smith berdasarkan pengalaman historis barat dalam proses industrialisasi. Teori ini lahir dari dunia Negara maju yang bercirikan industri maju, yang cukup kurang memadai diterapkan di dunia yang berbeda. Misalnya teori Lewis yang cukup akurat dan logis merepresentasikan proses penyerapan kerja dalam masa transisi menuju masyarakat modern yang dialami Barat ternyata untuk kecocokan penerapannya di negara-negara berkembang dengan kondisi yang lain banyak dipertanyakan.

BAB III KONSEP FAHIM KHAN TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI SURPLUS TENAGA KERJA

Muhammad Fahim Khan banyak terlibat di bidang pengembangan dan aplikasi ekonomi dan keuangan Islam baik sebagai peneliti, pengajar maupun sebagai penasehat pemerintah di bidang ekonomi Islam dan keuangan Islam selama 25 tahun terakhir.¹² Selama karier profesionalnya, Fahim Khan menggeluti berbagai bidang, antara lain bidang pembangunan ekonomi, perdagangan asing dan ekonomi internasional, keuangan dan perbankan, investasi dan analisis finansial, migrasi tenaga kerja internasional, ekonomi dan keuangan Islam, statistika dan ekonometrika. Ia juga memimpin berbagai uji coba terkait pengembangan model-model ekonometrika bagi perencanaan dan proyeksi ekonomi makro, juga memimpin riset terkait berbagai isu kebijakan ekonomi makro.¹³

Menurut Fahim Khan solusi problem ekonomi surplus tenaga kerja memang dapat ditangani melalui dua strategi. Pertama strategi menciptakan kesempatan kerja berupah tetap. Kedua, strategi menciptakan peluang kewirausahaan. Sayangnya strategi pembangunan ekonomi padat penduduk dalam kerangka konvensional hanya memfokuskan pada strategi yang pertama, yaitu berupaya

¹² Lihat: "Authors' Biography", *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume-6, Number-2, hlm. 117.

¹³ Lihat: Biodata of Dr. Fahim Khan – IRTI Publication, http://www.irtipms.org/Fahim%20Khan_E.asp, diakses 10 September 2014.

dengan berbagai cara untuk menciptakan kesempatan kerja berupah tetap bagi tenaga kerja secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Strategi ini membutuhkan para kapitalis untuk berinvestasi memperluas lapangan pekerjaan. Para kapitalis ini cenderung memakai surplus sumber daya manusia untuk dipekerjakan bukan untuk dilibatkan dalam aktivitas kewirausahaan. Strategi konvensional ini cenderung mengabaikan strategi penciptaan peluang kewirausahaan sebagai solusi problem ekonomi surplus tenaga kerja.¹⁴

Secara umum kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang masih rendah, baik dari sisi pendidikan maupun skill manajemen kewirausahaannya. Memberikan peluang wirausaha kepada mereka bukan berarti menyediakan pabrik besar atau toko besar untuk dikelola. Memberikan peluang kewirausahaan berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan usaha yang dapat mereka kelola sendiri. Misalnya membuka peluang atau memfasilitasi mereka yang memiliki ketrampilan dasar entah sebagai tukang kayu, penjahit, tukang bangunan, tukang bikin makanan kecil dan sebagainya untuk mendirikan unit manufaktur kecil yang mempekerjakan beberapa orang saja yang mungkin anggota keluarganya sendiri. Kesuksesan usaha bukan milik mereka yang berpendidikan tinggi saja, tidak jarang ada orang yang buta huruf dan tidak berpendidikan sukses menjalankan usaha kecil – usaha kecil dengan penghasilan yang tidak kalah dari gaji tetap pegawai atau karyawan. Bahkan dewasa ini banyak diwacanakan dalam beberapa literatur tentang pentingnya pengembangan industri skala kecil.¹⁵

Fahim Khan mengambil contoh kasus di Pakistan dan Indonesia sebagai negara dengan kondisi ekonomi berlimpah tenaga kerja. Di negara-negara ini orang menganggur bukan karena tidak mau bekerja, tetapi karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan sesuai apa yang mereka bisa kerjakan. Dengan pendapatan perkapita yang masih rendah, tentu orang-orang ini memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dengan bekerja. Ketika tidak ada penawaran pekerjaan, mereka tidak dapat menjalankan bisnis atau usaha mandiri karena tidak memiliki modal sendiri. Pada umumnya Negara dengan surplus tenagakerja, sebagian besar sumber daya manusianya tidak memiliki modal. Mereka membutuhkan pinjaman modal jika ingin melakukan usaha mandiri.¹⁶

Strategi membuka peluang kewirausahaan bagi surplus sumber daya manusia memerlukan beberapa prasyarat sebagai berikut:

- a. Ketersediaan modal yang diperlukan oleh surplus tenaga kerja dalam memulai usaha mandiri.
- b. Adanya sistem yang dapat menjamin pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengusaha.

¹⁴ Fahim Khan, Op.Cit., hlm. 198.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., 198-199.

c. Adanya sistem penjaminan sosial yang dapat menopang dan membimbing kehidupan pelaku usahahingga mereka meraih kesuksesan berwiraswasta.¹⁷

Ketiga prasyarat tersebut dipakai Fahim Khan untuk memperbandingkan antara sistem konvensional berbasis bunga dengan sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil dalam mensupport strategi menciptakan peluang kewirausahaan.

Sistem ekonomi non-Islam yang berbasis bunga dinilai tidak berhasil mewujudkan prasyarat-prasyarat di atas terutama di negara-negara berkembang yang berpenduduk padat. Sistem berbasis bunga dipandang tidak menyediakan modal yang dibutuhkan oleh calon wirausahawan potensial yang akan memulai usaha. Sistem ini lebih tertarik untuk membiayai usaha mapan yang dapat memastikan terhindar dari kredit macet dan berbagai resiko pembiayaan. Pengajuan pembiayaan oleh orang baru akan memulai usaha biasanya menuntut dipenuhinya persyaratan yang sulit termasuk jaminan yang kadang tidak dapat dipenuhi oleh calon pelaku usaha. Dalam kondisi ini tentu ia akan lebih memilih untuk mencari kerja berupah tetap dari pada melakukan usaha mandiri yang sulit dan beresiko.¹⁸

Fahim Khan berkali-kali menegaskan kejelasan strategi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam yang menekankan lebih pentingnya pengaturan institusional untuk secara langsung melibatkan orang dalam kegiatan kewirausahaan mereka sendiri daripada strategi memanjakan kapitalis untuk menciptakan kesempatan kerja dengan upah pasti di pasar kerja. Ekonomi Islam memiliki mekanisme *built-in* untuk mendukung strategi tersebut. Mekanisme yang sudah built-in ini dapat lebih diperkuat dengan langkah-langkah berikut:

1. Kemampuan kewirausahaan adalah modal sumber daya manusia yang harus dikembangkan oleh pendidikan yang tepat. Perencanaan pendidikan yang tepat dapat berkontribusi banyak untuk mengurangi risiko wirausaha dengan terciptanya iklim sosial yang kondusif serta kesadaran bersama untuk mentaati segala aturan main. Tidak hanya pendidikan komersial, pendidikan Islam memiliki peranan penting yang tidak boleh diabaikan untuk menciptakan iklim sosial yang mendukung bisnis konstruktif serta menanamkan etika dan moral masyarakat.
2. Perluasan akomodasi finansial melalui sistem perbankan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan pembiayaan bagi sumber daya manusia enterprener. Efisiensi sistem perbankan dalam menyediakan pembiayaan tersebut dalam kerangka Islam mempersyaratkan reformasi substansial tidak hanya dalam struktur perbankan yang ada, tetapi pada seluruh sektor fiskal dan moneter. Dalam kerangka Islam, bank dan lembaga keuangan seharusnya diminta untuk menawarkan akomodasi keuangan hanya untuk pengusaha. Pinjaman konsumtif dari perbankan komersial hampir tidak ada karena pinjaman ini harus berupa qardl hasan (pinjaman tanpa bunga atau tanpa bagi hasil)

¹⁷ Ibid., h. 199.

¹⁸ Ibid., hlm. 199-200.

3. Institusi Islam hisbah harus dihidupkan kembali untuk mengawasi secara efektif norma-norma keadilan sosial ekonomi dalam perekonomian. Harga, sewa, alat-alat produksi, struktur produksi, struktur upah, pasar dan fungsinya, dan sebagainya, semua masuk dalam lingkup pengawasan lembaga ini.¹⁹

BAB IV

KONSEP FAHIM KHAN DALAM DISKURSUS EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

A. Latar Belakang Konsep Fahim Khan dan Pendekatan yang dipakai

Tulisan Fahim Khan dilatarbelakangi oleh pengamatannya terhadap kegagalan strategi pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang mengadopsi teori-teori pembangunan ekonomi yang dirumuskan oleh ahli ekonom barat. Ia secara khusus menyebut Indonesia, Banglades dan Pakistan. Dalam kasus di Indonesia misalnya, strategi pembangunan yang dipakai adalah strategi neoklasik yang diusung oleh Robert Solow, Paul samuelson dan juga Milton Friedmann. Strategi ini menitik beratkan pada pembangunan berpola industrialisasi secara besar-besaran dengan keyakinan akan adanya trickle down effect (efek rambatan) yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Strategi ini dibuktikan dengan suksesnya Program Marshall Plan dalam rekonstruksi negara-negara Eropa Pasca Perang Dunia II.²⁰

Konsep Fahim Khan juga dilatarbelakangi terjadinya akumulasi modal besar-besaran sebagai konsekuensi dari strategi industrialisasi tersebut. Penciptaan lapangan kerja lewat melalui industrialisasi ini memerlukan akumulasi modal melalui mobilisasi tabungan atau bahkan dengan pinjaman dari luar negeri. Kalangan pemodal diharapkan dapat berinvestasi sebesar-besarnya. Diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan keuntungan kelompok kapitalis ini dengan berbagai insentif fiskal dan moneter dengan tetap mempertahankan upah dalam tingkat minimal.²¹

Kegagalan strategi tersebut dalam analisis Fahim Khan karena lebih terfokus pada penyerapan tenaga kerja sektor formal yang mempersyaratkan investasi besar dari kalangan pemodal. Strategi ini kurang mendukung ketersediaan peluang kewirausahaan rakyat yang mandiri. Penilaian akan kegagalan tersebut memunculkan konsep Fahim Khan tentang strategi pembangunan ekonomi Islam. Penciptaan peluang kewirausahaan dijadikan Fahim Khan sebagai kata kunci dalam konsepnya yang mengkritisi strategi konvensional dan mendukung strategi pembangunan ekonomi Islam.

¹⁹ Ibid., hlm. 208.

²⁰ Wahyu Budi Nugroho, *Industrialisasi Orde Baru Tumbuh dengan Kemiskinan*, <http://kolomsosiologi.blogspot.com/2011/03/industrialisasi-orde-baru.html>, 12 Maret 2011.

²¹ Fahim Khan, Op.Cit., hlm. 197-198.

Paling tidak ada tiga konteks yang melatar belakangi konsep Fahim Khan. Pertama konteks latar belakang kehidupan dan akademiknya. Kedua, tren pembangunan ekonomi kontemporer. Dan ketiga tren pengembangan ekonomi Islam. Setting latar belakang pendidikan Fahim Khan yang memiliki dasar keilmuan statistik di jenjang kesarjanaannya awalnya, yang kemudian dikembangkan dengan bidang ilmu ekonomi. Serta keterlibatannya dalam pembuatan berbagai model, ikut memberi warna konsepnya yang amat memperhatikan model matematika. Model matematika terkesan mensimplifikasi masalah dalam persamaan dan angka.

Dalam merumuskan gagasan ekonomi Islamnya, Fahim Khan memakai metode pemikiran retrospektif, sebagaimana dipakai oleh kebanyakan pemikir ekonomi Islam kontemporer. Metode ini berangkat dari penelaahan terhadap problematika ekonomi di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan-persoalan ekonomi umat dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Tuhan.²² Pendekatan yang dipakai oleh Fahim Khan ini karena ia berupaya mencari solusi dengan memakai aturan normatif ekonomi Islam yang ia interpretasikan dalam model ekonomi makro.

B. Analisis Implementasi Gagasan Fahim Khan dalam Diskursus Pembangunan Ekonomi Kontemporer

Dalam diskursus ekonomi pembangunan kontemporer, sebagaimana ditulis Wahyu Nugroho, muncul dua strategi pembangunan ekonomi. Yaitu strategi strukturalis dan strategi neoklasik. Strategi pembangunan model strukturalis menekankan perombakan masyarakat terkait sistem, kelembagaan, institusi-institusi sosial bahkan kehidupan demokrasi di dalamnya. Setelah peombakan-perombakan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai (semisal terminimalisirnya pihak-pihak yang dirugikan) barulah pembangunan ekonomi dijalankan. Sedangkan strategi neoklasik menitik beratkan pada pembangunan berpola industrialisasi secara besar-besaran dengan keyakinan akan adanya trickle down effect (efek rambatan) yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Strategi ini dibuktikan dengan suksesnya Program Marshall Plan dalam rekonstruksi negara-negara Eropa Pasca Perang Dunia II.²³

Gagasan Fahim Khan merupakan konsep ideal yang ditawarkan untuk mengatasi problem kelebihan tenaga kerja dalam rangka pembangunan ekonomi menuju kesejahteraan penduduk. Fahim Khan hanya menyoroti strategi neoklasik yang digambarkannya hanya terfokus pada upaya memperluas kesempatan kerja agar secara cepat dapat menyerap seluruh tenaga kerja yang

²² Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, Terj. Machnun Husein, "Ekonomi Islam (TelaaH Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 12.

²³ Wahyu Budi Nugroho, *Industrialisasi Orde Baru Tumbuh dengan Kemiskinan*, <http://kolomsosiologi.blogspot.com/2011/03/industrialisasi-orde-baru.html>, 12 Maret 2011.

berlimpah. Strategi tersebut dinilai Fahim Khan tidak berhasil memenuhi harapan mencapai titik balik atau tinggal landas sebagaimana direncanakan.²⁴

Kegagalan strategi tersebut dalam penilaian Fahim Khan penyebabnya sederhana, yakni menyederhanakan strategi pembangunan ekonomi surplus tenaga kerja hanya pada upaya pembangunan yang difokuskan pada percepatan penyerapan tenaga kerja dengan menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja dengan upah/gaji tetap.²⁵ Dalam konsep Fahim Khan tujuan pembangunan nasional seharusnya untuk menghasilkan peluang-peluang yang pertama kali menyerap surplus sumber daya manusia menuju ke titik balik atau tinggal landas, setelah itu surplus sumber daya manusia yang tersisa menjadi terdorong untuk terserap ke dalam sistem.²⁶

Strategi penekanan kewirausahaan Fahim Khan tersebut tentu tidak terlepas dari tren perkembangan ekonomi makro atau ekonomi pembangunan kontemporer. Dalam kajian ekonomi makro kontemporer ditekankan pentingnya posisi pengusaha dalam pembangunan ekonomi. Luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi. Apabila tersedianya pengusaha dalam jumlah tertentu penduduk adalah lebih banyak, lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan.²⁷ Kewirausahaan menjadi faktor penting yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi.²⁸

Faim Khan, sebagaimana para ahli ekonomi Islam lainnya menguatkan teori bahwa Islam dengan ajaran yang dibawanya dan institusi-institusi yang dimunculkannya, memiliki kontribusi positif bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Monzer Kahf²⁹ misalnya melihat bahwa ajaran Islam yang terkait dengan zakat, larangan riba serta pola kemitraan dalam musyarakah/mudlarabah, dapat menjadi strategi riil untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Bahkan Maya Shatzmiller dalam artikelnya *Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World* dengan menelaah peran instiusi-institusi Islam pada periode-periode pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa ada kejelasan indikator yang menunjukkan bahwa aturan ekonomi Islam dan institusi-institusinya mendukung dan sama sekali tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi. Artikel Maya membantah Greif dan Timur Kuran yang menganggap aturan dan institusi Islam tidak berhasil mematerialisasikan pertumbuhan ekonomi.³⁰

Dukungan Fahim Khan terhadap ekonomi Islam lebih pada dukungan formalitas pmbelakuan fiqh muamalah dari pada prinsip atau nilai ekonomi Islam dengan aplikasi yang lebih

²⁴ Fahim Khan, Op.Cit., hlm. 98.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., hlm. 202.

²⁷ Sadono Sukirno, *Makro konomi Teori Pengantar*, edisi ketiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 430.

²⁸ Daniel Smith, The Role of Entrepreneurship in Economic Growth, *Undergraduate Economic Review*, Vol. 6 [2010], Iss. 1, Art. 7, Digital Commons @ IWU, 2010, h.1, <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=uer>, diakses 8 Agustus 2014.

²⁹ Monzer Kahf, Op.Cit., hlm. 75-95.

³⁰ Maya Shatzmiller, "Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 54 (2011) 132-184,

efektif komprehensif. Penekana pada sisi formalitas ini nampak pada apa yang ia maksudkan dengan bagi hasil. Ia hanya mempromosikan bagi hasil atau kemitraan dengan format mudharabah atau musyarakah. Ia tidak mencoba mengimplementasikannya dengan lebih luas dan berimbang. Konsep Fahim Khan masih kental normatifnya. Ia membuat batasan hitam putih antara sewa dengan kemitraan. Fahim Khan kurang memperhatikan inovasi aplikasi nilai kemitraan secara fungsional. Ia masih berkatut pada normativitas syirkah dan mudharabah. Padahal di Jepang yang bukan negara Islam saja berhasil mengartikulasikan prinsip kemitraan ini pada bidang hubungan antara pekerja dan perusahaan. Prinsip sewa telah diramu dengan prinsip kemitraan. Gerakan produktivitas Jepang menunjukkan bagaimana kejasama atau bagi hasil diimplementasikan di antara pekerja dan yang mempekerjakan. Berbeda dengan ilmu ekonomi klasik yang memandang tenaga kerja manusia sebagai bagian dari unsur pokok produksi di samping modal dan tanah, konsep produktivitas Jepang menekankan bahwa manusia secara alamiah membuat barang dan jasa yang diperlukan untuk hidup. Sedangkan tanah, modal dan teknologi adalah alat untuk produksi. Manusia harus memainkan peranan utama dalam memanfaatkan nilai guna dari ketiga unsur tersebut. Perusahaan perlu memperhatikan dimensi sosial kerjasama kerja sama antar tenaga kerja. Tenaga kerja harus dipandang sebagai prioritas di atas modal, tanah dan teknologi. Di sini, tenaga kerja merupakan bentuk keunikan tingkah laku dari jenis manusia dan meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki kondisi kerja merupakan landasan bagi pengisian hidup secara baik serta memberikan “arti” bagi kehidupan manusia.³¹

Strategi pembangunan dengan gerakan produktivitas model Jepang memiliki persamaan dengan prinsip maqashid al-syari’ah fi al-iqtishad, utamanya prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama’ah wa al-I’tilaf wa al-ta’awun*). Artinya dengan menerapkan semangat kebersamaan dan semangat berbagi yang diterapkan pada hubungan antara pengusaha dan karengusaha dan karyawan membuahkan semangat kerjasama yang berimbang pada kenaikan produktivitas yang dinikmati bersama.

Strategi yang demikian masih luput dari gagasan Fahim Khan. Fahim Khan menyederhanakan strategi pembangunan ekonomi hanya pada persoalan membuka peluang kewirausahaan bagi surplus sumber daya manusia, yang mempersyaratkan ketersediaan modal untuk memulai usaha mandiri dalam sistem *profit and loss sharing* yang dapat menjamin pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pengusaha, serta adanya sistem penjaminan sosial yang dapat menopang dan membimbing kehidupan pelaku usaha hingga mereka meraih kesuksesan berwiraswasta.³² Apa yang disebutkan Fahim Khan ini adalah diberlakukannya

³¹ J. Ravianto, *Orientasi Produktivitas dan Ekonomi Jepang, Apa Yang Harus Dilakukaan Indonesia ?*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 32.

³² Fahim Khan, Op.Cit., hlm. 199.

musyarakah dan mudharabah sebagai pengganti sistem bunga. Padahal pemberlakuan mudharabah membutuhkan kondisi masyarakat yang kondusif agar mudharabah memberi masalah. Bahkan khazanah fiqh klasik telah memperingatkan hal ini. Dalam *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan mudharabah dipersyaratkan empat hal yakni sifat amanah, keahlian/skill usaha yang baik, kejujuran dan keikhlasan. Keempat unsur ini yang dapat menjamin diberlakukannya mudharabah yang membawa hasil. Jika tidak ada keempat unsur ini maka aplikasi mudharabah dapat menimbulkan pemubaziran harta. Bahkan ditegaskan bahwa mudharabah dilarang ketika pihak yang terlibat tidak amanah, tidak efisien dan tidak memiliki keahlian mengelola dana.³³

Strategi Fahim Khan belum sampai kepada kendala yang dihadapi yang secara empiris terjadi ketika digalakkan usaha berbasis bagi hasil. Tidak sedikit orang yang tertarik dan terdorong melakukan usaha tetapi tidak mencapai kesuksesan yang diharapkan bukan karena tidak ada peluang tetapi karena ada faktor lain yang lebih mendasar. Salah satunya diungkap oleh Musa Asy'arie. Dalam pembinaan industri kecil dan menengah, banyak menghadapi masalah terkait keterbatasan dalam akses pasar, sumber-sumber pembiayaan dan permodalan, penguasaan teknologi dan informasi, keterbatasan dalam organisasi dan manajemen, serta pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antara pelaku ekonomi yang ada. Di atas itu semua Musa Asy'arie mengungkapkan adanya persoalan mendasar yang mengurung pelaku usaha sehingga sulit untuk keluar dari banyak masalah tersebut. Meski banyak bantuan tersedia dan ada niat yang besar dari dalam diri mereka namun terasa berat untuk melangkah maju. Persoalan mendasar yang mengurung ini lebih bersifat kultural, yaitu sistem nilai budaya yang telah membentuk kepribadian pelaku usaha yang sudah berjalan puluhan tahun. Sistem nilai budaya ini mempengaruhi cara pelaku usaha tersebut menjalankan usaha (manajemen), seperti cara dalam bekerja, menghadapi mitra bisnisnya, menangani karyawan, mengelola uang, menggunakan keuntungan, menghadapi pesaing dan bertahan menghadapi perubahan dan menghadapi krisis.³⁴

Diperlukan Strategi pendekatan yang yang fundamental, terpadu dan berkelanjutan untuk membina dan memberdayakan para pelaku usaha kecil antara lain pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang perlunya memahami setting budaya di mana industri itu tumbuh berkembang. Sebagai contoh lingkungan pedesaan berpengaruh membentuk pola budaya agraris, sementara tantangan yang dibawa oleh dunia industri mengharuskan adanya basis budaya industri yang inovatif, tepat waktu, akurat dan konsisten pada mutu yang terjaga secara konstan, responsif terhadap tuntutan persaingan, terbuka terhadap perubahan dan persaingan yang makin ketat. Perbedaan budaya ini terlihat dalam cara memandang uang, waktu dan teknik. Dalam budaya agraris waktu dipandang sebagai gerak siklus sedangkan dalam budaya industrial dipandang

³³ Abd al-Rahman Al-Jazairi, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990, hlm. 36.

³⁴ Musa Asy'arie, *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, Yogyakarta : LESFI, 2001, hlm. 124.

sebagai gerak linier. Dalam budaya agraris uang lebih bermakna sosial sementara dalam budaya industrial lebih bermakna ekonomi. Teknologi dalam budaya agraris dipandang sebagai prestise sehingga tidak optimal pemanfaatannya sementara budaya industri menuntut pemanfaatan teknologi yang canggih, optimal dan rasional.³⁵

Fahim tidak banyak menjelaskan pra-kondisi masyarakat untuk diberlakukannya sistem bagi hasil sebagaimana disebutkan dalam persyaratan mudharabah. Padahal penyiapan kondisi masyarakat baik secara skill maupun moral yang kondusif untuk usaha produktif ini sangat penting. Beberapa negara Islam sangat memperhatikan strategi ini. Saudi Arabia misalnya, berkembang cukup dramatis. Di tahun 1960 an kebanyakan penduduknya adalah nomaden atau semi nomaden. Arab Saudi melakukan strategi pembangunan dengan proyek utama mentransformasikan penghasil minyak untuk membentuk Negara industry modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam. terjadi import tenaga kerja besar-besaran. Persoalan yang dihadapi adalah mendidik tenaga kerja domestic berkeahlian. Minyak adalah sumberdaya manusia yang tidak dapat diperbaharui.³⁶

Tidak disebutkannya strategi pembangunan sumber daya manusia yang kondusif barangkali karena titik bidik Fahim Khan lebih pada upaya mempromosikan sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil sebagai alternatif sistem ekonomi konvensional berbasis bunga. Ini menyebabkan gagasan Fahim Khan tersebut terkesan kurang komprehensif bila dikaitkan dengan wacana kontemporer pembangunan ekonomi.

C. Konsep Fahim Khan dan Pengembangan Ekonomi Islam di Bidang Perbankan

Kesemarakan pemikiran ekonomi Islam modern terpicu oleh tumbuh kembangnya perbankan Islam yang merupakan realisasi dari gagasan untuk membentuk kembali perekonomian berdasarkan Islam. Gagasan ini terkait dengan semangat kebangkitan kembali Islam di mana keuangan, perbankan dan investasi menjadi garapan terpenting dalam proses Islamisasi ekonomi. Perbankan modern berbasis bunga ditolak dan dianggap tidak Islami karena adanya larangan Al-Qur'an terhadap riba yang dimaknai sebagai larangan terhadap bunga.³⁷ Sistem kerja sama berdasarkan prinsip bagi hasil dipakai sebagai alternatif dasar bagi dunia perbankan dan investasi dalam perspektif Islam.³⁸

Dalam semangat menyemarakkan bank syariah tersebut pemikiran Fahim Khan hadir. Gagasannya mempromosikan keunggulan sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil atas system ekonomi konvensional berbasis bunga dalam memacu pembangunan ekonomi surplus tenaga kerja.

³⁵ Ibid., hlm. 124-132.

³⁶ Todaro, Michael P. *Economic Development*, Edisi VI, New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1997, hlm. 664-665.

³⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, terj. Asep Hikmat Suhendi dari judul asli "Bank Islam", Bandung : Penerbit Pustaka, 1984, hlm. xiii.

³⁸ Ibid., hlm. xiii.

Konsep Fahim Khan tentang formulasi Islam tentang strategi pembangunan ekonomi di negara-negara yang mengalami surplus tenaga kerja tersebut mengasumsikan kondisi-kondisi ideal sebagaimana yang ia gambarkan dari aturan-aturan normatif ekonomi Islam. Poros dari aturan normatif yang ia jadikan prinsip dasar adalah prinsip bagi hasil dan prinsip anti riba (bunga) sebagai fondasi bangunan ekonomi Islam.

Fahim Khan mengkritik sistem ekonomi berbasis bunga yang menekankan solusi penanganan problem ekonomi surplus tenaga kerja melalui strategi menciptakan kesempatan kerja berupah tetap. Strategi konvensional ini hanya berupaya dengan berbagai cara untuk menciptakan kesempatan kerja berupah tetap bagi tenaga kerja secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Strategi ini membutuhkan para kapitalis untuk berinvestasi memperluas lapangan pekerjaan. Para kapitalis ini cenderung memakai surplus sumber daya manusia untuk dipekerjakan bukan untuk dilibatkan dalam aktivitas kewirausahaan. Strategi konvensional ini cenderung mengabaikan strategi penciptaan peluang kewirausahaan sebagai solusi problem ekonomi surplus tenaga kerja.³⁹

Fahim Khan meyakini bahwa institusi ekonomi Islam dengan perbankan syariahnya memiliki pengaruh kuat untuk menciptakan dan mendorong kegiatan kewirausahaan dalam perekonomian. Keharaman riba merupakan pengaturan institusional yang memaksa salah satu sumber daya yang langka dalam perekonomian (yakni modal finansial) untuk aktivitas kewirausahaan dari pada disewakan untuk memperoleh sewa modal. Fahim Khan menegaskan bahwa modal keuangan dilarang keras untuk memperoleh sewa, yaitu bunga. Satu-satunya cara agar modal keuangan dapat menghasilkan pendapatan adalah dengan melibatkannya dalam aktivitas kewirausahaan di mana keuntungan yang akan diperoleh merupakan imbalan resiko kerugian produktif. Membiarkan modal finansial menganggur juga tidak disukai. Ada beban pungutan zakat atas sumber daya jika tidak digunakan dalam kegiatan-kegiatan produktif.⁴⁰ Modal finansial tidak dapat menghasilkan apa-apa tanpa melibatkan sumber komplementer. Sumber daya komplementer yang terbaik adalah sumber daya manusia, terutama ketika sumber daya manusia ini sangat banyak sehingga modal finansial dapat menegosiasikan rasio bagi-hasil yang lebih baik. Dengan demikian, pengaturan institusional Islam seperti perbankan syariah ini tidak hanya memaksa sumber daya finansial untuk menjadi sumber daya wirausaha, tetapi juga menciptakan permintaan sumber daya manusia.⁴¹

Sistem ekonomi Islam dengan institusi philanthropisnya yang menjamin kebutuhan hidup minimal dan sistem perbankan syariahnya yang tidak memakai bunga. Dalam sistem ini, individu yang berwirausaha menghadapi risiko yang jauh lebih sedikit. Risiko akan dibagi antara pelaku wira usaha dan pemilik modal finansial. Risiko finansial bahkan ditanggung sepenuhnya oleh para pemilik modal finansial. Ketika terjadi kerugian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan

³⁹ Fahim Khan, Op.Cit., hlm. 198.

⁴⁰ Ibid., hlm. 203.

⁴¹ Ibid.

modal. Pelaku usaha sudah mempertaruhkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Ketika terjadi kebangkrutan usaha, tidak ada ketakutan kelaparan karena masyarakat menjamin kebutuhan pokoknya. Dalam suasana yang demikian, sumber daya manusia akan lebih tertarik mencari kegiatan kewirausahaan dari pada pekerjaan dengan upah tetap. Mereka akan memiliki pekerjaan tetap sebatas sampai mereka dapat menemukan modal finansial yang diperlukan untuk memulai kegiatan kewirausahaan.⁴²

Namun demikian, idealitas perbankan syariah berbasis bagi hasil tersebut berhadapan dengan realitas operasional perbankan syariah terutama dari sisi pembiayaan. Dalam konsep fiqh yang digunakan dalam merumuskan operasionalisasi perbankan Syari'ah ada dua kategori prinsip/metode pembiayaan yakni model penyertaan modal dengan prinsip bagi hasil (prinsip *mudlarabah/musyarakah*) dan prinsip *mark-up & fee* (pengambilan keuntungan dan upah).⁴³ Sebagai lembaga bisnis, untuk tetap eksis bank syari'ah dituntut dapat menghasilkan keuntungan dengan tetap berlabelkan Islam/berpijak pada aturan-aturan hukum Islam. sudah barang tentu dalam pembiayaan bank syariah lebih memilih memakai akad murabahah atau ijarah dengan prinsip *mark-up & fee* (pengambilan keuntungan dan upah) dari pada memakai akad mudlarabah atau musyarakah yang berbasis prinsip bagi hasil yang tidak memberi kepastian keuntungan di muka.

Terhadap banyaknya pilihan akad dalam perbankan syariah yang memudahkan bank memakai prinsip yang bukan berbasis bagi hasil ini, Fahim Khan justru apresiatif dan tidak memberikan kritikan. Ia malah terkesan mendukung dengan pernyataannya:

“It, however, does not mean that the other financing techniques are less important and need to be discarded. They have their own uses and applications both at micro and macro levels. They not only complement the profit-loss sharing methods but also provide flexibility of choice to meet the specific needs of different sectors and different economic agents in the society.”⁴⁴

(Ini, bagaimanapun, tidak berarti bahwa teknik pembiayaan lainnya kurang penting dan perlu dibuang. Masing-masing memiliki kegunaan dan aplikasinya sendiri baik di tingkat mikro dan makro. Teknik-teknik pembiayaan yang lain tersebut tidak hanya melengkapi metode bagi hasil (profit-loss sharing), tetapi juga menyediakan fleksibilitas pilihan untuk memenuhi kebutuhan khusus dari berbagai sektor dan pelaku ekonomi yang berbeda di masyarakat).

Pernyataan Fahim Khan tersebut terkesan tidak konsisten dengan formulasi konsepnya yang berpijak pada sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil. Padahal dalam konsepnya, Fahim Khan menegaskan bahwa proses pembangunan dalam ekonomi Islam pertama-tama dengan mengganti sistem bunga dengan sistem bagi untung/rugi. Maka dibolehkannya pembiayaan memamakai

⁴² Ibid.

⁴³ Pada prinsipnya ada lima jenis akad yang mendasari sistem pengembangan produk di bank Syari'ah yaitu : Prinsip *Wadi'ah* (simpanan), Prinsip *Syirkah* (kerja sama bagi hasil), Prinsip *Tijarah* (jual beli / pengembalian keuntungan), Prinsip *Al-Ajr* (pengambilan fee) dan Prinsip *Al-Qardl* (biaya administrasi). Lihat: Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Iskam*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 5-6.

⁴⁴ Fahim Khan, *Comparative Economics of Some Islamic Financing Tehniques*, <http://www.irti.org/>, diakses 14 Pebruari 2014.

prinsip jual beli/murabahah atau sewa (ijarah) yang memastikan mark-up yang jelas dan pasti dari pihak pelaku usaha yang dibiayai tanpa tergantung kondisi untung rugi usahanya, berarti upaya menyemarakkan aktivitas kewirausahaan menjadi tidak maksimal dan masih mirip yang terjadi pada pembiayaan berbasis bunga yang banyak dikritik Fahim Khan.

Perbankan Syariah sebagai institusi keuangan Islam menuntut ditumbuhkembangkan dengan diversifikasi produk yang tidak hanya terpaku pada musyarakah dan mudharabah. Fahim Khan mentolerirnya bukan berarti inkonsisten dengan gagasannya yang mengidealkan prinsip bagi hasil sebagai satu-satunya basis sistem ekonomi Islam. Tetapi Fahim Khan mengikuti gradualitas proses pemakaian sistem berbasis bagi hasil yang menyemarakkan kewirausahaan menuju kemakmuran. Proses ini membutuhkan pengkondisian yang menyangkut kebijakan negara dan pembinaan sumber daya baik skill maupun moral.⁴⁵ Pemodal dan pelaku usaha dengan didukung sistem yang tepat akan mempercepat proses menyemarakkan wira usaha yang dipandang sebagai strategi Islami pembangunan ekonomi padat penduduk.

Formulasi konsep Islam untuk pembangunan ekonomi padat penduduk perpektif Fahim Khan memang menekankan strategi pembangunan ekonomi pada pengaturan institusional untuk secara langsung melibatkan orang dalam kegiatan kewirausahaan daripada strategi memanjakan kapitalis untuk menciptakan kesempatan kerja dengan upah pasti di pasar kerja. Tetapi Fahim Khan menyadari bahwa meskipun ia meyakini bahwa mekanisme tersebut sudah *built-in* dalam ajaran ekonomi Islam, harus diciptakan kondisi yang mendukung dan memperkuat mekanisme tersebut melalui langkah sebagai berikut:

4. Memperkuat pendidikan skill usaha dan moralitas Islami sekaligus. Kemampuan kewirausahaan adalah modal sumber daya manusia yang harus dikembangkan oleh pendidikan yang tepat. Perencanaan pendidikan yang tepat dapat berkontribusi banyak untuk mengurangi risiko wirausaha dengan terciptanya iklim sosial yang kondusif serta kesadaran bersama untuk mentaati segala aturan main. Tidak hanya pendidikan komersial, pendidikan Islam memiliki peranan penting yang tidak boleh diabaikan untuk menciptakan iklim sosial yang mendukung bisnis konstruktif serta menanamkan etika dan moral masyarakat.
5. Reformasi untuk efisiensi sistem perbankan. Perluasan akomodasi finansial melalui sistem perbankan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan pembiayaan bagi sumber daya manusia enterprener. Efisiensi sistem perbankan dalam menyediakan pembiayaan tersebut dalam kerangka Islam mempersyaratkan reformasi substansial tidak hanya dalam struktur perbankan yang ada, tetapi pada seluruh sektor fiskal dan moneter. Dalam kerangka Islam, bank dan lembaga keuangan seharusnya diminta untuk menawarkan akomodasi keuangan hanya untuk pengusaha. Pinjaman konsumtif dari perbankan komersial hampir tidak ada karena pinjaman ini harus berupa qardl hasan (pinjaman tanpa bunga atau tanpa bagi hasil).

⁴⁵ Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics*, hlm. 208.

6. Memperkuat sistem pengawasan yang efektif. Institusi Islam hisbah harus dihidupkan kembali untuk mengawasi secara efektif norma-norma keadilan sosial ekonomi dalam perekonomian. Harga, sewa, alat-alat produksi, struktur produksi, struktur upah, pasar dan fungsinya, dan sebagainya, semua masuk dalam lingkup pengawasan lembaga ini.⁴⁶

Dapat digarisbawahi bahwa konsep Islami pembangunan ekonomi padat penduduk dalam pemikiran Fahim Khan merupakan sinergi antara normativitas ajaran Islam dengan institusi yang dibangunnya. Konsep ini memadukan antara aturan larangan riba dan perintah shodaqah. Larangan riba memerlukan institusionalisasi atau pelembagaan keuangan dan perbankan berbasis kemitraan berbagi untung dan rugi. Sedangkan perintah shadaqah memerlukan institusionalisasi philanthropi Islam dalam sistem operasionalisasi zakat, infaq dan shadaqah yang efektif sebagai sistem jaminan sosial yang akan membentengi kekhawatiran kegagalan usaha. Keberhasilan institusionalisasi larangan riba dan perintah shadaqah ini akan mendorong proses pembangunan dengan berbasis menyemarakkan industri kecil dan menengah atau kewirausahaan dengan didukung proses pendidikan yang efektif dan sistem pengawasan yang efektif pula.

BAB V KESIMPULAN

Formulasi konsep Islam tentang strategi pembangunan ekonomi padat penduduk menurut Fahim Khan bertumpu pada strategi perluasan aktivitas wira usaha produktif bukan bertumpu pada strategi perluasan lapangan kerja sektor formal dalam mengatasi surplus tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi. Strategi membuka dan menyemarakkan usaha mandiri produktif ini yang dipandang sesuai dengan sistem ekonomi Islam berbasis kemitraan berbagi untung dan rugi (profit-loss sharing). Strategi ini berbeda dengan strategi ekonomi konvensional berbasis bunga yang menekankan akumulasi modal untuk pengembangan industri guna menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tetapi konsep Fahim Khan masih lebih kental dengan formalisme aturan hukum Islam dari pada memperluasnya secara substansial.

Gagasan Fahim Khan dilatarbelakangi oleh pengamatannya terhadap kegagalan strategi pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang mengadopsi teori-teori pembangunan ekonomi yang dirumuskan oleh ahli ekonom Barat. Kegagalan strategi tersebut dalam analisis Fahim Khan karena lebih terfokus pada penyerapan tenaga kerja sektor formal yang mempersyaratkan investasi besar dari kalangan pemodal. Gagasan Fahim Khan ini tidak terlepas dari konteks latar belakang akademik dan kiprahnya memperkenalkan sistem keuangan Islam. Dalam merumuskan gagasannya, Fahim Khan memakai metode pemikiran retrospektif, sebagaimana dipakai oleh kebanyakan pemikir ekonomi Islam kontemporer. Metode ini menelaah persoalan-persoalan ekonomi kontemporer dengan merujuk pada norma ajaran Islam untuk

⁴⁶ Ibid.

mencari dukungan pemecahan problem tersebut. Fahim Khan merumuskan konsepnya dengan memotret fenomena ekonomi kontemporer aturan normatif ekonomi Islam yang ia interpretasikan dalam model ekonomi makro.

Pemikiran Fahim Khan tidak terlepas dari semangat menyemarakkan bank syariah. Gagasannya mempromosikan keunggulan sistem perbankan berbasis bagi hasil atas sistem perbankan konvensional berbasis bunga dalam memacu pembangunan ekonomi surplus tenaga kerja. Meskipun Fahim Khan meyakini bahwa sistem bagi hasil lah yang memiliki pengaruh kuat untuk menciptakan dan mendorong kegiatan kewirausahaan dalam perekonomian, ia tetap mendukung tumbuh kembangnya perbankan syariah dengan diversifikasi produk yang tidak hanya terpaku pada prinsip bagi hasil saja. Fahim Khan mengikuti gradualitas dimana proses menuju idealitas sistem bagi hasil yang menyemarakkan kewirausahaan membutuhkan penciptaan kondisi yang kondusif. Upaya pendidikan dan penguatan skill usaha, reformasi dan efisiensi perbankan syariah, penguatan sistem pengawasan adalah proses atau bagian yang tidak terlepas dari strategi pembangunan ekonomi padat penduduk dalam bingkai sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil yang menyemarakkan kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Authors’ Biography”, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume-6, Number-2.
- Al-Jazairi, ‘Abd al-Rahman, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Asy’arie, Musa, *Keluar dari Krisis Multi Dimensi*, Yogyakarta : LESFI, 2001.
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Biodata of Dr. Fahim Khan – IRTI Publication, http://www.irtipms.org/Fahim%20Khan_E.asp, diakses 10 September 2014.
- BR, Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Bronfenbrenner, Martin, et.al., *Economics*, Edisi II. Boston: Houghton Mifflin Company, 1989.
- Colander, David C., *Economics*, Edisi V, New York: McGraw-Hill/Irwin. 2004.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1994.
- Dornbusch, Rudiger, et.al., *Macroeconomics*, Edisi VIII. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2001.
- El-Ghazali, Abdel Hamid, *Man is The Basis of The Islamic Strategy For Economic Development*, Jeddah: IRTI-IDB, 1994.
- Hall, Robert E. dan John B. Taylor, *Macroeconomics Theory, Performance, and Policy*, Edisi II. New York: W. W. Norton & Company, 1988.
- Haq, Mahbub u, *Reflections on Human Development : How The Focus of Development Economics Shifted from National Income Accounting to People Centred Policies, Told by One of The Chief Architects of The New Paradigm*, New York: Oxford Univ. Press, 1995.

- Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE, 1996.
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, Terj. Machnun Husein, "Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Khan, Fahim, *Comparative Economics of Some Islamic Financing Tehniques*, <http://www.irti.org/>, diakses 14 Pebruari 2014.
- Khan, Fahim, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1995.
- Mahyudi, Akhmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004.
- McConnell, Campbell R., et.al., *Contemporary Labor Economics*, Edisi VII. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2006.
- Meier, Gerald M., *Leading Issues in Economic Development*, Edisi V, New York : Oxford University Press, 1989..
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Iskam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Nugroho, Wahyu Budi, *Industrialisasi Orde Baru Tumbuh dengan Kemiskinan*, <http://kolomsosiologi.blogspot.com/2011/03/industrialisasi-orde-baru.html>, 12 Maret 2011.
- Perkins, Dwight H., Steven Radelet dan David L. Lindauer, *Economics of Development*, Edisi VI, New York : W.W. Norton & Company, Inc., 2006.
- Qahf, Muhammad Mundhir, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, Plainfield, Ind.: Muslim Students Association of U.S. and Canada, 1978.
- Ravianto, J., *Orientasi Produktivitas dan Ekonomi Jepang, Apa Yang Harus Dilakukaan Indonesia ?*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, Edisi ke-18. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2005.
- Schiller, Bradley R., *The Economy Today*, ninth edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2003.
- Shatzmiller, Maya, "Economic Performance and Economic Growth in the Early Islamic World", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 54 (2011) 132-184.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Issues in Islamic Banking*, terj. Asep Hikmat Suhendi dari judul asli "Bank Islam", Bandung : Penerbit Pustaka, 1984.
- Smith, Daniel, "The Role of Entrepreneurship in Economic Growth", *Undergraduate Economic Review*, Vol. 6 [2010], Iss. 1, Art. 7, Digital Commons @ IWU, 2010, h.1, <http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1064&context=uer>, diakses 8 Agustus 2014.
- Soeroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Sukirno, Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Swasono, Sri-Edi, *Menolak Neoliberalisme dan Membangun Ekonomi Nasional*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010.
- Tjokroamidjojo, Bintoro & Mustopadidjaya, *Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Haji Massagung, 1988.
- Todaro, Michael P. *Economic Development*, Edisi VI, New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1997.
- Todaro, Michael P., *Economic Development in The Third World*, Edisi IV, New York: Longman.